



Analisis Rasio Keuangan APBD untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020-2024

Naning Setiani^{1*}, Aris Eddy Sarwono²

¹²Universitas Slamet Riyadi

Alamat: Jl. Sumpah Pemuda No. 18, Kadipiro, Surakarta

Korespondensi penulis: nastyani713@email.com

Abstract. *This study aims to analyze the financial performance of the West Java Provincial Government using financial ratio analysis based on the Regional Budget (APBD) for the fiscal years 2020–2024. The research employs a descriptive quantitative method using secondary data from the Budget Realization Report. The analysis includes five financial ratios: fiscal independence, degree of fiscal decentralization, PAD effectiveness, expenditure harmony, and the share and growth of locally generated revenue (PAD). The results show that West Java's financial performance is categorized as moderately good, with an increasing level of fiscal independence, although PAD effectiveness remains suboptimal. The fiscal capacity mapping places the province in quadrant II, indicating high PAD growth but a contribution level that still requires improvement. These findings reflect strong fiscal potential that needs more focused management strategies.*

Keywords: APBD, financial performance, financial ratios, Local Own-Source Revenue

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui pendekatan rasio keuangan terhadap APBD tahun anggaran 2020–2024. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan data sekunder dari Laporan Realisasi Anggaran. Analisis dilakukan menggunakan lima indikator rasio keuangan, yaitu rasio kemandirian, derajat desentralisasi fiskal, efektivitas PAD, keserasian belanja, serta analisis kontribusi dan pertumbuhan PAD (share and growth). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Provinsi Jawa Barat berada pada kategori cukup baik dengan tingkat kemandirian yang meningkat, namun efektivitas PAD belum optimal. Pemetaan kemampuan fiskal daerah menunjukkan posisi pada kuadran II, yakni pertumbuhan PAD tinggi dengan kontribusi yang masih dapat ditingkatkan. Temuan ini mengindikasikan adanya potensi fiskal yang kuat namun membutuhkan strategi pengelolaan yang lebih terfokus.

Kata kunci: APBD, Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan, Pendapatan Asli Daerah.

LATAR BELAKANG

Dalam bentuknya yang paling sederhana, anggaran merupakan dokumen yang menggambarkan posisi keuangan suatu organisasi dan berisi informasi tentang

Received Maret 30, 2025; Revised April 30, 2025; Accepted Juni 27, 2025

* Naning Setiani, nastyani713@email.com

pendapatan, pengeluaran, serta aktivitas (Jundia & Sarwono, 2023). Dalam konteks pemerintahan daerah, anggaran dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menjadi instrumen utama dalam merumuskan serta merealisasikan kebijakan pembangunan daerah. Struktur APBD yang memuat komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan merupakan ringkasan keuangan pemerintahan daerah dalam menjalankan otonomi selama periode satu tahun anggaran (Putri & Munandar, 2021).

Salah satu daerah dengan kapasitas fiskal besar dan peran strategis dalam pembangunan nasional adalah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan laporan (Idris, 2024), Provinsi Jawa Barat secara konsisten menduduki peringkat kedua sebagai daerah dengan nominal APBD terbesar di Indonesia. Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD menetapkan APBD sebesar Rp 36,27 triliun sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2024. Namun demikian, angka ini mengalami penurunan dibandingkan APBD Perubahan Tahun 2023 yang mencapai Rp 37,74 triliun. Penurunan ini mengindikasikan adanya dinamika fiskal yang perlu dikaji lebih dalam. Untuk memahami lebih jauh implikasi dari dinamika ini terhadap pengelolaan keuangan daerah, diperlukan alat evaluasi yang akurat dan komprehensif

Salah satu bentuk pertanggungjawaban dan alat evaluasi kinerja keuangan tersebut adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports), laporan finansial dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) (Pilat & Morasa, 2017). Melalui LKPD, publik dan pemangku kepentingan dapat menilai kinerja keuangan pemerintah daerah secara objektif, baik dari sisi kemampuan pendapatan, pola pembelanjaan, maupun efisiensi pengelolaan dana publik.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah berdasarkan LKPD adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan. Rasio-rasio tersebut antara lain mencakup rasio kemandirian keuangan, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, dan rasio keserasian belanja langsung dan tidak langsung. Selain itu, pendekatan *share and growth* juga penting digunakan untuk menilai kontribusi dan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung

belanja daerah. Analisis ini tidak hanya memberikan gambaran kuantitatif mengenai posisi keuangan daerah, tetapi juga menjadi dasar untuk perumusan kebijakan fiskal yang lebih strategis dan berkelanjutan.

KAJIAN TEORITIS

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa APBD adalah instrumen penting yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung kesejahteraan publik. Merujuk pada Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, APBD berisi keseluruhan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah selama menjalankan kegiatan pemerintahannya (Putri & Munandar, 2021).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan tahunan atas pelaksanaan APBD. LKPD terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). (Halim & Kusufi, 2016) menekankan bahwa LKPD merupakan alat utama untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah secara finansial, serta menjadi dasar pengambilan kebijakan fiskal dan manajerial.

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja secara efektif, efisien, dan mandiri. Menurut Sulistyo (2018) ,evaluasi kinerja keuangan dapat dilakukan melalui analisis rasio terhadap APBD, seperti rasio kemandirian, desentralisasi fiskal, efektivitas, dan keserasian belanja. (Halim & Kusufi, 2016) menambahkan bahwa rasio-rasio tersebut memberikan gambaran objektif mengenai posisi keuangan daerah dan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan fiskal. Selain itu, analisis share and growth juga digunakan untuk menilai kontribusi dan pertumbuhan PAD sebagai indikator kemampuan fiskal daerah jangka panjang.

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintah dan pembangunan tanpa tergantung pada dana dari pemerintah pusat.

$$\text{Rasio Kemandiria} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan pemerintah Pusat dan pinjaman}} \times 100 \%$$

Tabel 1 Kriteria Penilaian Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Presentase (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25 %	Instruktif
Rendah	> 25 % - 50 %	Konsultatif
Sedang	> 50% - 75 %	Partisipatif
Tinggi	> 0% - 100 %	Delegatif

Sumber: Halim 2007 (Zukhri & Korespondensi, 2020)

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio ini mengukur kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Rasio ini menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam menggali potensi pendapatan sendiri. Semakin tinggi kontribusi yang diberikan PAD maka semakin tinggi pula kemampuan daerah tersebut menjalankan otonomi daerah.

$$\text{Rasio Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Tabel 2 Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal	Keterangan
0,00 % - 10 %	Sangat Kurang
10,01 % - 20,00 %	Kurang
20,01 % - 30,00 %	Sedang
30,01 0% - 40,00%	Cukup
40,01 0% - 50,00%	Baik
> 50,00%	Sangat Baik

Sumber: Hanafi,dkk 2007 (Zukhri & Korespondensi, 2020)

3. Rasio Efektivitas

Rasio ini mengukur efektivitas pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD berdasarkan Potensi Rill Daerah}} \times 100 \%$$

Tabel 3 Rasio Efektivitas

Derajat Desentralisasi Fiskal	Keterangan
0,00 % - 10 %	Sangat Kurang
10,01 % - 20,00 %	Kurang
20,01 % - 30,00 %	Sedang
30,01 0% - 40,00%	Cukup
40,01 0% - 50,00%	Baik

Sumber: Mahmudi 2019 (dalam Aminuddin & Winarningsih, 2024)

4. Rasio Keserasian Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Rasio ini menunjukkan keseimbangan antara belanja langsung (untuk pelayanan publik) dan belanja tidak langsung (gaji, tunjangan, operasional)

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100 \%$$

$$\text{Rasio Belanja Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100 \%$$

5. Analisis kemampuan keuangan daerah

1. Perhitungan dan Analisis *Share* and *Growth*

Analisis share digunakan untuk mengukur proporsi atau persentase pendapatan asli daerah dalam membiayai seluruh belanja daerah selama periode waktu tertentu, sehingga memberikan gambaran tentang kemampuan keuangan daerah dalam mengelola dan memenuhi kebutuhan belanja daerah (Aminuddin & Winarningsih, 2024).

$$\text{Share} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100 \%$$

Analisis growth digunakan untuk mengetahui kapasitas keuangan daerah yang menitikberatkan pada kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) dari satu periode ke periode berikutnya.

$$\text{Growth} = \frac{PAD_i}{PAD_{i-1}} \times 100 \%$$

Keterangan :

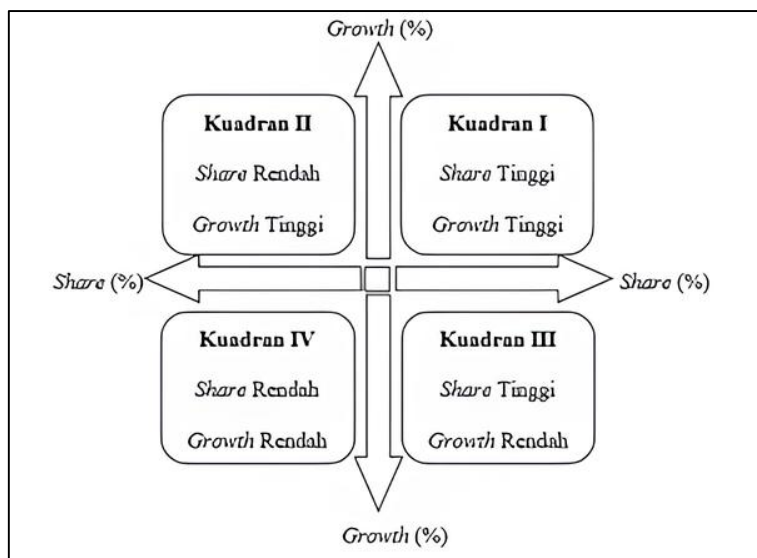
PAD : Pendapatan Asli Daerah

i : Periode Saat Ini

i- 1 : Periode Sebelumnya

2. Peta Kemampuan Keuangan Daerah

Peta Kemampuan Keuangan Daerah merupakan gambaran visual yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu daerah dapat mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimilikinya. Pemetaan ini dilakukan dengan pendekatan kuadran yang didasarkan pada hasil analisis kontribusi (share) dan pertumbuhan (growth) Pendapatan Asli Daerah (PAD).



Sumber: Bappenas, 2003 (Aminuddin & Winarningsih, 2024)

Gambar 1 Peta Kemampuan Keuangan Share and Growth

Empat Kuadran Kemampuan Keuangan Daerah:

1. Kuadran I (Ideal): Share dan growth PAD tinggi → daerah kuat dan mampu mengembangkan potensi lokal.
2. Kuadran II: Share PAD rendah tapi growth tinggi → ada potensi berkembang.
3. Kuadran III: Share PAD tinggi tapi growth rendah → peran PAD besar, tapi pertumbuhannya lambat.
4. Kuadran IV (Buruk): Share dan growth PAD rendah → belum mampu memanfaatkan potensi lokal.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah motode deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa angka-angka yang diambil dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat selama lima tahun yakni dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi data sekunder yang diperoleh dari situs resmi (Direktorat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2025) DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia . Instrumen dan teknik analisis data yang digunakan adalah perhitungan rasio keuangan, yang meliputi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, Rasio Keserasian Belanja Langsung dan Tidak Langsung, serta Analisis Share and Growth. Metode analisis dilakukan dengan menghitung nilai rasio setiap tahun, lalu mendeskripsikan hasilnya dalam bentuk tabel dan grafik untuk mempermudah interpretasi visual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

1. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah Pemeritah Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4 Rasio Kemandirian

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Pendapatan Transfer	Rasio Kemandirian	Hasil Kriteria	Pola Hubungan
2020	39.915,36 M	67.159,91 M	59,433 %	Sedang	Partisipatif
2021	45.351,78 M	69.736,25 M	65,033 %	Sedang	Partisipatif
2022	49.218,53 M	65.183,02 M	75,508 %	Tinggi	Delegatif
2023	52.173,77 M	68.596,66 M	76,059 %	Tinggi	Delegatif
2024	55.286,28 M	71.352,20 M	77,484 %	Tinggi	Delegatif
Rata-rata			70,703 %	Sedang	Partisipatif

Sumber: Data Diolah Peneliti (2025)

Rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat berada pada tingkat rata-rata 70,703 % dan dapat dikategorikan “sedang” dengan pola hubungan “partisipatif” . Hal ini mengindikasikan bahwa Provinsi Jawa Barat mulai menunjukkan

kemampuan dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri melalui pengoptimalan potensi PAD. Namun demikian, meskipun sudah mengalami peningkatan secara fluktuatif dalam tiga tahun terakhir pemerintah daerah masih perlu menjaga konsistensi dan terus meningkatkan efisiensi dalam pemungutan PAD. Tujuannya adalah agar kemampuan keuangan daerah menjadi lebih mandiri dan stabil dalam jangka panjang, serta semakin mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat.

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	Kriteria Desentralisasi
2020	39.915,36 M	132.143,10 M	30,206 %	Cukup
2021	45.351,78 M	128.149,58 M	35,390 %	Cukup
2022	49.218,53 M	121.122,14 M	40,635 %	Baik
2023	52.173,77 M	127.662,14 M	40,869 %	Baik
2024	55.286,28 M	141.193,70 M	39,156 %	Cukup
Rata-rata			37,251%	Cukup

Sumber: Data Diolah Peneliti (2025)

Rasio derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama 2020–2024 rata-rata sebesar 37,251%, masuk dalam kategori “cukup”. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih belum optimal, sehingga ketergantungan terhadap dana pusat tetap tinggi. Pemerintah daerah perlu mendorong peningkatan PAD dengan mengembangkan sektor potensial, memperluas basis pajak, dan meningkatkan efisiensi pemungutan pajak serta retribusi, hal ini dikarenakan desentralisasi fiskal yang lebih tinggi akan meningkatkan kapasitas daerah dalam menjalankan otonomi secara efektif dan akuntabel.

3. Rasio Efektivitas PAD

Rasio derajat efektivitas Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6 Rasio Efektivitas

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Target Penerimaan PAD berdasarkan Potensi Rill Daerah	Rasio Efektivitas	Kriteria rasio Efektivitas
2020	39.915,36 M	50.219,92 M	79,481 %	Tidak Efektif
2021	45.351,78 M	49.585,57 M	91,462 %	Tidak Efektif
2022	49.218,53 M	48.140,18 M	102,240 %	Sangat Efektif
2023	52.173,77 M	52.318,46 M	99,723 %	Tidak Efektif
2024	55.286,28 M	56.284,16 M	98,227 %	Tidak Efektif
Rata-rata			94,227%	Tidak Efektif

Sumber: Data Diolah Peneliti (2025)

Rasio efektivitas PAD Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam lima tahun terakhir menunjukkan rata-rata sebesar 94,227%, yang tergolong dalam kategori “tidak efektif”. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi PAD belum sepenuhnya mampu mencapai target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Meskipun pada tahun 2022 rasio efektivitas sempat menyentuh kategori “sangat efektif”, namun secara keseluruhan kinerja pengelolaan PAD masih perlu ditingkatkan melalui upaya peningkatan basis pajak, digitalisasi sistem pemungutan, serta penguatan pengawasan terhadap sumber-sumber PAD lainnya.

4. Rasio Keserasian Belanja

Rasio keserasian belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7 Rasio Keserasian Belanja

Tahun Anggaran	Total Belanja Tidak Langsung	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Tidak Langsung
2020	41.674,83 M	141.536,02 M	29,445 %
2021	42.932,96 M	136.161,52 M	31,531 %
2022	32.317,79 M	125.580,82 M	25,735 %
2023	33.852,10 M	132.343,99 M	25,579 %
2024	38.449,51 M	148.174,14 M	25,949 %
Rata-rata			27,648 %

Tahun Anggaran	Total Belanja Langsung	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Langsung
2020	99.861,19 M	141.536,02 M	70,555 %

2021	93.228,56 M	136.161,52 M	68,469 %
2022	93.263,03 M	125.580,82 M	74,265 %
2023	98.491,89 M	132.343,99 M	74,421 %
2024	109.724,63 M	148.174,14 M	74,051 %
Rata-rata			72, 352 %

Sumber: Data Diolah Peneliti (2025)

Rasio keserasian belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjukkan rata-rata belanja tidak langsung sebesar 27,648% dan belanja langsung sebesar 72,352%. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi belanja langsung lebih besar dibanding belanja tidak langsung selama lima tahun terakhir. Kondisi ini mencerminkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk belanja yang bersifat produktif, seperti pembangunan fisik, pelayanan publik, dan program pemberdayaan masyarakat. Dominasi belanja langsung yang tinggi menandakan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan dan pembangunan daerah. Namun demikian, perlu tetap menjaga efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran agar hasil yang dicapai sesuai dengan target pembangunan daerah.

5. Share and Growth

Tabel 8 Share and Growth

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Total Belanja Daerah	Nilai
2020	39.915,36 M	141.536,02 M	28,202 %
2021	45.351,78 M	136.161,52 M	33,307 %
2022	49.218,53 M	125.580,82 M	39,193 %
2023	52.173,77 M	132.343,99 M	39,423 %
2024	55.286,28 M	148.174,14 M	37,312 %
Rata-Rata Share			35,487 %

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Growth
2020	39.915,36 M	-
2021	45.351,78 M	113,620%
2022	49.218,53 M	108,526%
2023	52.173,77 M	106,004%
2024	55.286,28 M	105,966%
Rata-rata Growth		108, 529%

Sumber: Data Diolah Peneliti (2025)

ari hasil perhitungan rata-rata share dan growth terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2020–2024, diperoleh rata-rata share sebesar 35,487% dan rata-rata growth sebesar 108,529%. Berdasarkan pemetaan

ke dalam kuadran penilaian kemampuan keuangan daerah, posisi Provinsi Jawa Barat berada pada kuadran II, yaitu share tinggi dan growth tinggi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kontribusi PAD terhadap total belanja daerah masih belum ideal, namun laju pertumbuhan PAD tergolong sangat tinggi. Artinya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun. Ini menjadi sinyal positif dan potensi yang harus terus dikembangkan melalui optimalisasi potensi ekonomi lokal dan perbaikan sistem pemungutan pajak serta retribusi daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah tergolong sedang dengan kecenderungan partisipatif, yang menunjukkan adanya kemampuan pemerintah dalam membiayai kegiatan pemerintahan secara mandiri, meskipun masih terdapat ketergantungan terhadap dana pusat. Rasio desentralisasi fiskal berada dalam kategori cukup, menandakan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih dapat ditingkatkan. Sementara itu, efektivitas PAD belum optimal secara konsisten, walaupun pada tahun tertentu sempat menunjukkan kinerja sangat baik. Rasio keserasian belanja menunjukkan bahwa proporsi belanja langsung lebih dominan, yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan. Hasil analisis share and growth menempatkan Jawa Barat pada kuadran II, yakni dengan pertumbuhan PAD yang tinggi namun kontribusinya terhadap belanja daerah belum maksimal, sehingga menunjukkan potensi fiskal yang masih dapat dikembangkan.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mengoptimalkan potensi PAD melalui perbaikan sistem pemungutan, perluasan basis pajak, dan digitalisasi pelayanan. Peningkatan kapasitas fiskal daerah juga perlu diimbangi dengan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada pendekatan kuantitatif yang hanya menggunakan data sekunder dari Laporan Realisasi Anggaran, sehingga disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk mempertimbangkan pendekatan kualitatif atau studi komparatif antar

daerah guna memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai dinamika kinerja keuangan daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Aminuddin, N., & Winarningsih, S. (2024). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan dan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Otonomi Daerah. *Journal of Economics and Business UBS*, 13(1), 404–427. <https://doi.org/10.52644/joeb.v13i1.1416>
- Direktorat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2025). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. <https://djpk.kemenkeu.go.id>
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2016). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Idris, M. (2024). 5 Daerah dengan APBD Terbesar di Indonesia, Jakarta Peringkat Pertama. *Kompas.Com*. <https://money.kompas.com/read/2024/09/12/104203426/5-daerah-dengan-apbd-terbesar-di-indonesia-jakarta-peringkat-pertama?source=BacaCepat>
- Jundia, H. S., & Sarwono, A. E. (2023). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Provinsi Jatim Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2018-2022. *Jurnal Maneksi*, 12(3), 675–681. <https://doi.org/10.31959/jm.v12i3.1738>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.
- Pilat, J. J., & Morasa, J. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011—2015. *Accountability*, 6(1), 45. <https://doi.org/10.32400/ja.16026.6.1.2017.45-56>
- Putri, R. S. E., & Munandar, A. (2021). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016-2020*. 5(3).
- Sulistyo, A. T. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur*.
- Zukhri, N., & Korespondensi, A. (2020). *Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau Dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, Dan Desentralisasi Fiskal*. 2.

